

Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi Jawa Barat

Didiet Widiowati ^a

^a Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Keywords:

Kesejahteraan Sosial

Corresponding Author:

Didiet Widiowati
Politeknik Kesejahteraan
Sosial Bandung
Email: didiet.widiowati
@poltekesos.ac.id

Abstract *Tourism Village is a village that is able to optimize its community assets for tourism development. The purpose of developing a Tourism Village is to empower the community to be able to play a role as direct actors in optimizing tourism potential so that their welfare can be improved. Research on Tourism Village Development Planning for Community Empowerment in Gede Pangrango Village, Kadudampit District, Sukabumi Regency aims to develop a Gedepangrango Tourism Village Development Planning Design which includes Identification of tourism potential and tourist attractions; Stakeholder mapping; Increase awareness of tourism or "Sapta Pesona" for the surrounding community; Selection of community working team; Preparation of work plans; and Formulation of Village Regulations. The research method used was Participatory action research with a qualitative approach. The research technique used was in-depth interviews, observation, documentation study, and FGD. Sources of research data are community leaders, village officials, district head, and other relevant parties. The results showed that Gede Pangrango Village has community assets that support the development of the Tourism Village. Stakeholders and relevant parties contribute to the development of tourism villages. A Community Working Team consisting of community officials and leaders is formed and participates in compiling a work plan and village regulations for the development of a Tourism Village. This research resulted in a Community Empowerment design including the development of a Tourism Village, where Tourism as a Driving Force, Community Assets as a Business Core, Partnership and Multi-stakeholder Networking as a Focal Concern, Synergy of Community Based Activity, and Participatory Planning.*

Abstrak: *Desa Wisata adalah Desa yang mampu mengoptimalkan aset komunitas yang dimiliki untuk pengembangan pariwisata. Tujuan pengembangan Desa Wisata adalah untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung dalam mengoptimalkan potensi wisata sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Penelitian Perencanaan Pengembangan Desa Wisata untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gede Pangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi bertujuan Mengembangkan Desain Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Gedepangrango yang meliputi Identifikasi potensi wisata dan daya tarik wisata; Pemetaan pemangku kepentingan (Stakeholder); Peningkatan sadar wisata atau Sapta pesona bagi masyarakat sekitar; Pemilihan kelompok kerja masyarakat (TKM); Penyusunan Rencana kerja; serta Penyusunan Peraturan Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah Participatory action research dengan pendekatan kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi serta FGD. Sumber data penelitian adalah tokoh masyarakat, aparat desa, camat serta pihak-pihak yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Gede Pangrango memiliki aset komunitas yang mendukung pengembangan Desa Wisata. Para pemangku kepentingan dan pihak2 yang relevan berkontribusi dalam pengembangan desa wisata. Tim Kerja Masyarakat yang terdiri dari aparat dan tokoh masyarakat terbentuk dan berpartisipasi dalam menyusun rencana kerja serta peraturan desa untuk pengembangan Desa Wisata. Penelitian ini menghasilkan desain Pemberdayaan Masyarakat mll pengembangan Desa Wisata, dimana Pariwisata sebagai Driving Force, Aset komunitas sebagai Core Bisnis, Kemiteraan dan Jejaring Multi pihak sebagai Focal Concern, Sinergitas kegiatan Berbasis Masyarakat (Community Based) dan Perencanaan Partisipatif (Participatory Planing*

PENDAHULUAN

Desa Gedepangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat terletak di kawasan dataran tinggi. Desa Gedepangrango berada tepat di Kaki Gunung Gede dan Kaki Gunung Pangrango. Desa Gedepangrango merupakan salah satu desa penyangga Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), karena memang berbatasan langsung dengan wilayah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Jumlah keluarga miskin di Desa Gede Pangrango cukup banyak, seperti yang tertera pada table dibawah ini:

Tabel 1.1 : Jumlah Kepala Keluarga di Desa Gede Pangrango

No.	Tahapan Keluarga Sejahtera	Jumlah (KK)
1.	Pra Sejahtera	457
2.	Keluarga Sejahtera I	902
3.	Keluarga Sejahtera II	433
4.	Keluarga Sejahtera III	161
5.	Keluarga Sejahtera IV	30
	Jumlah	1983

Sumber: BKKBD Per Juni 2017

Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah keluarga miskin (Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I) di Desa Gedepangrango sangat riskan, dari 1983 Kepala Keluarga ada 1359 Kepala Keluarga Miskin. Jika dihitung dengan persentase, maka ada 68,53%, artinya hampir $\frac{3}{4}$ keluarga di Desa Gedepangrango masih masuk kedalam kategori keluarga miskin. Sedangkan untuk keluarga tidak miskin, ada 624 kepala keluarga atau sekitar 31,47%. Jumlah Keluarga miskin di Desa Gedepangrango tahun 2015 adalah 2423 orang.

Masalah kemiskinan pada umumnya menyebabkan permasalahan sosial lainnya seperti BALITA terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, ADK,ODK, PRSE, pengemis, pemulung, dll, seperti yang tertera pada table berikut ini:

Tabel 1.2: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Desa Gedepangrango Tahun 2017

No.	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah
1.	Anak Balita Telantar	26
2.	Anak Telantar	201
3.	Anak dengan Kedisabilitas	19
4.	Anak Jalanan	1
5.	Lanjut Usia Telantar	57
6.	Penyandang Disabilitas	11
7.	Pemulung	3
8.	Pengemis	2
9.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	78
10.	Fakir Miskin	2423
11.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	2
	Jumlah	2823

Sumber: BKKBD Per Juni 2017

Sudah banyak program pemerintah yang diturunkan untuk mengatasi masalah tersebut. Namun upaya yang dilakukan belum secara signifikan sesuai antara target dengan realisasi. Disisi lain, Desa pangrango juga kaya akan potensi dan sumber yang dapat dioptimalkan untuk memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, pada Tahun 2017, peneliti mencoba mengkaji aset komunitas (*fisical capital, environmental capital, human capital, social capital, technological capital, financial capital, spiritual capital*) yang dimiliki Desa Gede Pangrango dan bagaimana pemanfaatan aset komunitas dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin dengan cara melakukan pemetaan dan aksi sosial bersama masyarakat maupun stakeholder memanfaatkan aset komunitas yang ada secara optimal untuk memberdayakan masyarakat. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah mengsinergikan berbagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial kedalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan saat ini masyarakat sudah lebih mampu memanfaatkan aset komunitas untuk memberdayakan masyarakat di Desa Pangrango Kecamatan Kadudampit. Namun demikian, dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa ada satu aspek yang masih perlu ditingkatkan untuk memelihara (*maintenance*) upaya perubahan yang dilakukan yaitu kemampuan menjalin kemitraan (*bridging* dalam *social capital*) dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Potensi dan sumber yang ada di masyarakat merupakan aset komunitas yang dapat dioptimalkan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa optimalisasi aset komunitas sering terkendala karena ketidaksiapan sumber daya manusia (*human capital*) sebagai agen perubahan dan pelaksana kegiatan serta minimnya sumber-sumber lain yang mendukung upaya perubahan sehingga dibutuhkan kemitraan dengan multi pihak, baik dengan perguruan Tinggi, pemerintah maupun dunia usaha. Berdasarkan gambaran diatas, peneliti pada tahun 2018 melakukan penelitian berjudul “Kemitraan dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Aset di Desa Pangrango Kec. Kadudampit Kab. Sukabumi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah mampu menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, baik dengan multy stakeholder dari berbagai instansi pemerintah, unsur kekuatan masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi untuk mengoptimalkan seluruh *community asset* berupa potensi dan sumber yang tersedia di masyarakat baik potensi manusia, potensi alam, potensi modal social, financial, teknologi dan infra struktur yang ada untuk memberdayakan masyarakat. Salah satu potensi yang berhasil dikembangkan melalui kemitraan yang diharapkan dapat dioptimalkan sebagai *driving force* untuk meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat adalah potensi alam yang sangat indah berupa Situ (Danau) Gunung, Curug Sawyer, Sungai Cinumpang yang kepemilikannya ada di bawah Taman Hutan Nasional Gede Pangrango. Melalui kemitraan dengan PT Vontis Aquam Vivan sebagai pengembang dan modal pengembangan dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang totalnya sebanyak 10 milyar, legalitas dari Pemerintah Desa dan Kecamatan Kadudampit, Pemda Kabupaten Sukabumi, Dinas Pariwisata dan stakeholder terkait, pendampingan dan penyiapan masyarakat oleh Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) dan Universitas Muhammadiyah Indonesia (UMI) serta Pengelola Taman Hutan Nasional maka dikembangkan “Desa Wisata Destarasi”. Desa Wisata Destarasi yaitu Desa wisata yang terintegrasi antara wisata alam dengan wisata social, yang mengintegrasikan seluruh potensi yang ada untuk keberdayaan masyarakat.



Mengawinkan “Desa” dengan “Pariwisata” yang menghasilkan keturunan bernama “Desa Wisata” di tanah air. Membangun Indonesia dari pinggiran dapat dilakukan dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. (Presiden Republik Indonesia, Puncak Sail Selat Karimata 2016). Desa Wisata merupakan salah satu program Kementerian Desa dan PDTT Tahun 2017 (Menteri Desa dan PDTT, Kompas 2017). “Pemanfaatan Dana Desa dari Kementerian Desa dan PDTT untuk Pengembangan Desa Wisata. Jika 10% dari total Dana Desa dialokasikan untuk Pariwisata, maka sudah akan sangat membantu”. (Menteri Pariwisata, Kompas 2017). “Program *one village, one product*, koperasi di desa aktif dan kreatif ikut dalam pembentukan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang akan turut mengembangkan program homestay dan desa wisata”. (Menteri KUKM, Pikiran Rakyat 2017).

Pariwisata adalah salah satu industri yang paling berpotensi untuk dikembangkan di Desa Gedepangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Dengan membangun Desa Wisata maka akan menjadi stimulus positif bagi pertumbuhan perekonomian warga Desa Gedepangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Dalam membangun Desa Wisata, tidak cukup hanya dengan bermodalkan pemandangan alam yang indah saja akan tetapi dibutuhkan tiga modal lainnya, yaitu budaya, kreatifitas atau inovasi, dan juga dibutuhkan komitmen masyarakat desa dan pemerintahnya untuk mengembangkan dan merawat desanya sebagai Desa Wisata. Oleh karena itu, sebelum Desa Wisata dikembangkan, perlu ada sosialisasi tentang Desa Wisata agar masyarakat paham tentang pentingnya pengembangan potensi wisata sebagai *driving forces* untuk pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pelibatan masyarakat Desa Gede Pangrango dalam perencanaan Desa wisata akan mendorong masyarakat untuk mempersiapkan diri dan berpartisipasi dalam pengembangan Desa Wisata. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan pengembangan desa Wisata juga dapat memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata di wilayah mereka agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi para wisatawan yang berkunjung, serta memiliki kesadaran akan peluang dan kesiapan menangkap manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Latar belakang diatas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian aksi masyarakat secara partisipatif tentang “Perencanaan Pengembangan Desa Wisata untuk Pemberdayaan masyarakat Desa Gede

Pangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi.". Pertanyaan penelitiannya adalah "Bagaimanakah Perencanaan Pengembangan Desa Wisata untuk Pemberdayaan masyarakat Desa Gede Pangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi.

Rumusan Masalah dan Fokus Penelitian

1. Bagaimana Kondisi Awal Desa Wisata Gedepangrango (*look*)?
2. Bagaimana Desain awal Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Gedepangrango (*think*)
3. Bagaimana Implementasi dan refleksi Desain Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Gedepangrango (*Act*)?

METODE

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wisata Gedepangrango selama 1 tahun

B. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian tindakan partisipatif (*Participatory Action Research*). Alasan penggunaan metode penelitian ini adalah karena peneliti dalam penelitian ini tidak hanya ingin mengkaji secara mendalam tentang Rencana Pengembangan Desa Wisata Gedepangrango, tetapi juga ingin mencoba pendekatan baru di dalam praktik pekerjaan sosial yaitu perspektif kekuatan (*strength Prespective*) dimana peneliti bersama Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat berkolaborasi mencoba mengoptimalkan aset komunitas yang ada, terutama potensi alam menjadi Desa Wisata untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Gede Pangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi. Dengan demikian, diharapkan masyarakat lebih berdaya dan mampu melakukan upaya perubahan untuk mengatasi permasalahan Kemiskinan dan PMKS.

Pengertian penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2013 : 15) menyatakan

...berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Metode yang digunakan adalah penelitian tindakan (*action research*). Reason dan Bradbury (2006:11) mengungkapkan penelitian tindakan (*action research*) adalah:

Action research is a participatory process concerned with developing practical knowing in the pursuit of worthwhile human purposes. It seeks to bring together action and reflection, theory and practice, in participation with others, in the pursuit of practical solutions to issues of pressing concern to people, and more generally the flourishing of individual persons and their communities. (Penelitian tindakan adalah sebuah proses partisipatif yang berfokus pada pengembangan pengetahuan praktis untuk mencapai tujuan-tujuan mulia manusia, berlandaskan pandangan dunia partisipatif yang muncul pada momentum historis sekarang ini. Berusaha memadukan tindakan dengan refleksi, teori dengan praktek, dengan menyertakan pihak-pihak lain, untuk menemukan solusi praktis terhadap persoalan-persoalan yang menyesakkan, dan lebih umum lagi demi pengembangan individu-individu bersama komunitasnya).

Melalui penelitian kualitatif dengan metode penelitian tindakan (*action research*) peneliti akan mengkaji bagaimana Desain Perencanaan Pengembangan Desa Wisata untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gede Pangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi

Sumber Data Penelitian

- **Sumber data primer**

Mengutip dari Sugiyono (2013), peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan atau partisipan sebagai subyek penelitian, yaitu Tokoh Masyarakat, Masyarakat Desa Gede Pangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, Aparat Desa, Dinas Pariwisata dan sumber lain yang relevan. Sumber data dipilih secara purposive.

- **Sumber data Sekunder**

Menurut Indriantoro dan Supomo (2013:143) data sekunder adalah : “Sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer. Sumber data sekunder adalah sumber data atau informasi yang didapat dari studi dokumentasi, Observasi partisipatif yang berhubungan dengan kegiatan Perencanaan Pengembangan Desa Wisata di Desa Gede Pangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan Wawancara mendalam, Observasi Partisipatif, Studi Dokumentasi dan FGD. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) wawancara merupakan : Pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. Wawancara mendalam akan dilakukan secara perorangan kepada Tokoh yang meliputi unsur pengurus organisasi local, Kepala Desa, Camat, Dinas Pariwisata dan sumber lain yang relevan tentang Perencanaan Pengembangan Desa Wisata di Desa Gede Pangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan: “Suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan”. Observasi dilakukan peneliti dalam melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi subjek penelitian yaitu aktifitas Tokoh yang meliputi unsur pengurus organisasi local, Kepala Desa, Camat, Dinas Pariwisata dan sumber lain yang relevan dalam Perencanaan Pengembangan Desa Wisata di Desa Gede Pangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi.

Sugiyono (2013:240) mengungkapkan dokumen merupakan : “Catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang”. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Peneliti mempelajari dokumen – dokumen berkaitan dengan berbagai laporan dan catatan yang relevan dengan Perencanaan Pengembangan Desa Wisata di Desa Gede Pangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi.

Irwanto (2006: 1-2) mendefinisikan FGD adalah : Suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok”. Kegiatan ini akan dilakukan dalam *community meeting* (peretemuan) yang melibatkan aktifitas Tokoh yang meliputi unsur pengurus organisasi local, Kepala Desa, Camat,

Dinas Pariwisata dan sumber lain yang relevan dalam Perencanaan Pengembangan Desa Wisata di Desa Gede Pangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi.

C. Metode Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis kaulitatif dengan model teknik analisis interaktif. Menurut Miles dan Huberman 1984 dalam Madya (2011:7), teknik analisis interaktif terdiri dari komponen kegiatan yang saling terkait satu sama lainnya. Analisis data dalam penelitian ini yaitu :

1. Reduksi data yaitu proses seleksi, menemukan fokus, menyederhanakan, meringkas dan mengubah bentuk data mentah yang ada dalam catatan lapangan selama kegiatan Perencanaan Pengembangan Desa Wisata di Desa Gede Pangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi. Peneliti akan melakukan penajaman, pemilihan, pemfokusan, penyisihan data yang kurang bermakna dan menantanya sedemikian rupa sehingga muncul kesimpulan akhir di dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian data yaitu penyajian data dalam bentuk narasi, grafik diagram maupun gambar. Peneliti akan membuat laporan yang bersifat sistematis, interaktif dan invetif agar memudahkan orang untuk memahaminya yang berkaitan dengan Perencanaan Pengembangan Desa Wisata di Desa Gede Pangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi.
3. Penarikan kesimpulan yang dilakukan pada tahap awal sampai dengan tahap akhir yang merupakan kesimpulan akhir. Peneliti akan melakukan ekstraksi terhadap kegiatan Perencanaan Pengembangan Desa Wisata di Desa Gede Pangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi.

HASIL DAN PEMBAHASAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN DESA WISATA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA GEDEPANGRANGO KECAMATAN KADUDAMPIT KABUPATEN SUKABUMI JAWA BARAT

A. Kondisi Awal Desa Wisata Gedepangrango (*look*)



Pemetaan Aset Komunitas

Kondisi awal (base line) Desa Gede Pangrango pada saat akan dikembangkan sebagai Desa Wisata, baru ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Diantaranya adalah :

Identifikasi potensi wisata dan daya tarik wisata (Aset Komunitas); baik potensi fisik, potensi alam, potensi manusia, potensi teknologi, potensi sosial, potensi kelembagaan. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Tokoh masyarakat dalam hal ini Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) bapak Mu (inisial) diperoleh informasi bahwa: “di Desa Gede Pangrango ini sebenarnya sangat kaya akan potensi dan sumber yang diantaranya adalah Kopi. Kopi disini jenisnya arabica tapi tidak terlalu asam karena tanahnya basa”.

Potensi pertanian (Natural Capital) tersebut bisa dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan desa wisata apabila diolah menjadi sesuatu yang bisa menjadi bahan olahan pangan (something to eat). Cara pengolahan hasil pertanian tersebut dapat melibatkan perempuan-perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE), sehingga dapat mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang dapat menambah penghasilan mereka. Selain potensi pertanian, potensi hutan juga dimiliki Desa Gede Pangrango yang bisa dimanfaatkan untuk membuat kerajinan tangan yang bisa dijadikan buah tangan (something to bring).

Potensi terbesar yang merupakan modal dasar yang paling penting yang dimiliki Desa GDP yang bisa dioptimalkan menjadi potensi pengembangan Desa Wisata Alam adalah adanya air terjun yang dinamai oleh masyarakat sebagai Curug Sawyer. Selain itu ada sungai yang airnya sangat jernih dan mengalir deras, sehingga sangat potensial untuk dijadikan wahana arung jeram atau tubing. Sungai tersebut dikenal dengan nama Sungai Cinumpang. Potensi lain yang dapat dikembangkan menjadi obyek wisata adalah adanya sebuah situ yang terletak di Hutan Nasional, yang oleh masyarakat dikenal dengan nama Situ Gunung.

Aset komunitas lainnya yang dimiliki oleh Desa GDP adalah warisan budaya berupa kesenian yang menggabungkan antara kesenian calung, kendang pencak dan ngabodor atau yang oleh masyarakat dikenal dengan kesenian Caledor.

Apabila dikaji dari pernyataan –pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa baik Situ Gunung, Curug Sawyer, Sungai Cinumpang (Natural Capital) sebagai potensi objek wisata yang dilengkapi dengan Kesenian Caledor (Social Capital) sebagai warisan budaya merupakan unsur yang penting dalam pengembangan Desa Wisata dan pelestarian budaya daerah. Kedua hal tersebut telah dapat memenuhi unsur utama dalam pengembangan Desa Wisata yaitu something to see. Semua potensi yang ada, tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia (Human Capital) yang mampu mengolah dan mengelola sumber daya alam tadi menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih (value added). Oleh karena itu, campur tangan manusia baik sebagai tokoh masyarakat, Aparat Desa Pemerintah Daerah dan pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata. Untuk itu Identifikasi potensi manusia sebagai human capital penggerak pengembangan Desa Wisata perlu dilakukan. Berikut ini adalah potensi manusia yang diharapkan mampu berpartisipasi dalam pengembangan Desa Wisata.

Sekumpulan manusia sebagai human capital saja tidak cukup untuk mengembangkan Desa Wisata, diperlukan keterlibatan lembaga-lembaga atau institusi sebagai media yang dapat dijadikan wadah atau sarana yang dapat menampung aspirasi masyarakat, agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Desa Wisata.

Lembaga tersebut merupakan social capital karena bisa berperan sebagai media atau wadah partisipasi masyarakat dan dapat dijadikan bridging yang menjembatani aspirasi masyarakat dengan pihak luar dalam pengembangan Desa Wisata. Apabila dibuat matriks, maka potensi dan

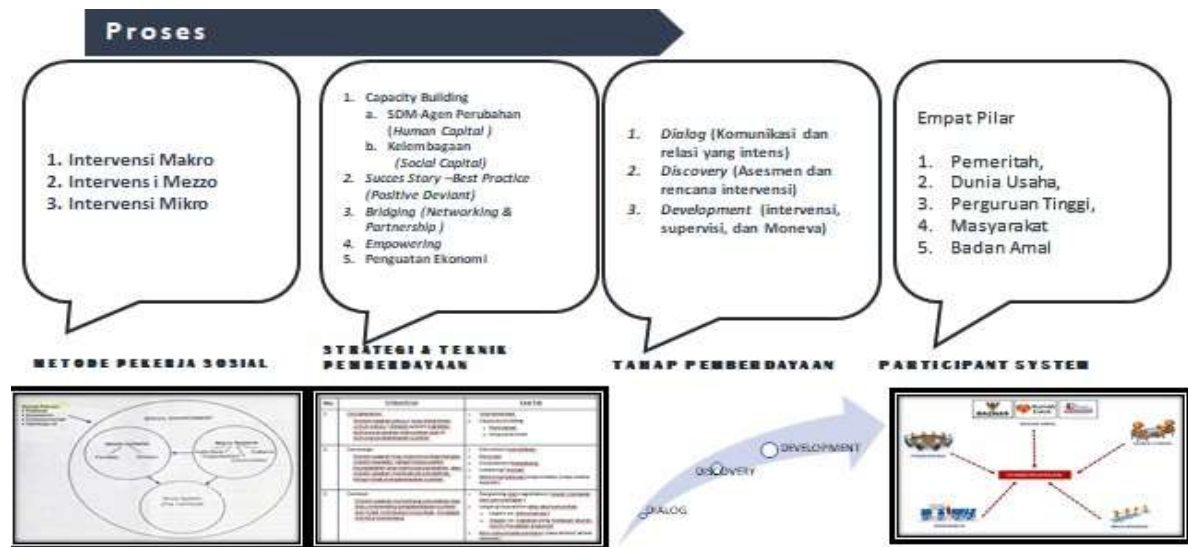
sumber yang merupakan aset komunitas yang dimiliki Desa Gede Pangrango untuk Pengembangan desa Wisata adalah sebagai berikut:

ASET KOMUNITAS		
NO.	JENIS ASET	NAMA ASET KOMUNITAS
1.	Modal Fisik	Masjid, BUMDes, Kantor Desa, Puskesmas, Pos Ronda, SMP, PDAM, Tanah Koperasi Unit Desa, Radio As-Salam, Gedung Posyandu, Gedung PAUD, Tanah Wakaf, Rumah Sosial, Gedung Raudhatul Athfal, Gedung Sekolah Dasar, Gedung Madrasah, Gedung Tempat Pendidikan Alqur'an, Asrama, Bale/Saung Budaya, Alat Musik Tradisional, Kantor Polisi, Kantor Kecamatan, Kantor Urusan Agama, Kantor Koramil, Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah, Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendidikan, Kantor Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Lapangan Bola, Gedung Olahraga, Rakata Campsite, Cinumpang, WC Umum, dan Sarana Air Bersih, Gedung Vila.
2.	Modal Alam/ Lingkungan	Lahan Perikanan, Lahan Perkebunan, Lahan Pertanian, Peternakan, Wisata Alam, Tanah Hak Guna Umum, Lahan Tempat Pemakaman Umum, Kopi, Padi, Sawi, Labu, Cesium, Bawon Daun, Tomat, Kucai.
3.	Modal Manusia	Pengrajin Layang-Layang, Pelatih Pencak Silat, Pelatih Celempung, Pelatih Karinding, Pengrajin Anyaman, Pengrajin Arkuh, Bidan, Wartawan, Pengrajin Sangkar Burung, Pengrajin Pengki, Petani Kopi, Ustadz.
4.	Modal Teknologi	Alat Pembuat Batako, Bengkel, Alat Pematang Rumput, Mesin Pengolah Kopi.
5.	Modal Finansial	Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS), Iuran/Kas RW-RT, Iuran Kematian, Arisan Posyandu,
6.	Modal Sosial	Kelembagaan Sosial, Kelompok Tani, Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Pengajian, Perkumpulan Pencak Silat, Gotong Royong.
7.	Modal Spritual	Pengajian Bapak-Bapak, Pengajian Ibu-Ibu, Pengajian Anak-Anak.

Namun demikian, untuk perencanaan pengembangan Desa Wisata memiliki aset komunitas saja tidak cukup. Diperlukan langkah-langkah lainnya agar pengembangan Desa Wisata dapat terencana dengan baik. Pembahasan disusun dalam serangkaian paragraf (pembuka, penghubung dan penutup). Paragraf pembuka merupakan pernyataan buah pikiran atau argumentasi. Paragraf pendukung merupakan pernyataan dukungan yang bersumber dari sejumlah pustaka yang relevan untuk mendukung argumentasi, sedangkan paragraf penutup merupakan pernyataan umum semacam simpulan kecil.

B. Desain awal Perencanaan Pengembangan Desa Wisata





C. Implementas Gede Pangrango dan Refleksi Desain Perencanaan Pengembangan Desa Wisata



1. Pemetaan pemangku kepentingan (Stakeholder).

Di dalam Perencanaan Pengembangan Desa Wisata, selain Pemetaan aset komunitas yang dapat dijadikan objek wisata, diperlukan juga Pemetaan pemangku kepentingan (Stakeholder). Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapat dukungan dan partisipasi dari multi pihak dalam Pengembangan Desa Wisata.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pemetaan stakeholder adalah *community meeting* dan *workshop* tentang rencana pengembangan Desa Wisata.

Teknik-teknik yang digunakan dalam kegiatan pemetaan stakeholder dalam perencanaan pengembangan desa wisata Gedepangrango, antara lain : *Focus group Discussion* (FGD)

Kegiatan pemetaan stakeholder ini dilaksanakan di Kantor Desa Gedepangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi.

Peserta pada kegiatan ini adalah para tokoh masyarakat, Aparat desa yang ada di Desa Gedepangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Camat dan Stakeholder lain yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.

Fasilitator pada kegiatan ini adalah peneliti dan Camat Kadudampit Kabupaten Sukabumi.

Hasil kegiatan pemetaan stakeholder adalah tersusunnya list atau daftar stakeholder yang berkomitmen untuk mendukung dan berkontribusi dalam pengembangan Desa Wisata.

Daftar stakeholder diatas adalah pihak-pihak yang berkolaborasi dan bersinergi dalam perencanaan pengembangan Desa Wisata. Keterlibatan dan pengakuan dari masing-masing stakeholder sangat penting dalam perencanaan pengembangan Desa Wisata sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



2. Peningkatan sadar wisata atau Sapta pesona bagi masyarakat sekitar (sosialisasi);

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan SOSIALISASI SAPTA PESONA DESA WISATA, sehingga masyarakat memahami apa yang dimaksud dengan Desa Wisata dan kemudian termotivasi untuk bersama sama mengembangkan Desa Wisata Gedepangrango. Hasil dari kegiatan SOSIALISASI Pengembangan Desa Wisata Gedepangrango ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pemberdayaan masyarakat dengan mensinergikan semua aset komunitas yang ada serta mengembangkan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat guna mengembangkan Desa Wisata.

Model yang digunakan adalah model edukasi dan Campanye pengembangan desa wisata dengan memanfaatkan *mass media appeal* dan tFGD, antara lain :

1. Video animasi tentang sapta pesona yang dibuat dari hasil kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman yang diimplementasikan oleh Bappenas dan GIZ serta Pemerintah Australia melalui *Knowledge Sector Initiative*;
2. Video *success story* Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta yang merupakan desa wisata terbaik ASEAN di tahun 2017;
3. Paparan tentang tips pengembangan desa wisata;
4. FGD (Focus Group Discussion) tentang Pengembangan Desa Wisata

Teknik-teknik yang digunakan dalam kegiatan Sosialisasi pengembangan desa wisata Gedepangrango, antara lain :

1. Pemanfaatan media berupa video;
2. *Success story* desa wisata yang berprestasi;
3. FGD tentang Pengembangan Desa Wisata

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Kantor desa Desa Gedepangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi.

Peserta pada kegiatan ini adalah para tokoh masyarakat yang ada di Desa Gedepangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi.

Fasilitator pada kegiatan ini adalah peneliti dan nara sumber dari Dinas Pariwisata.

Secara garis besar hasil kegiatan ini adalah masyarakat menjadi paham tentang :

1. Konsep dan Definisi Pariwisata
2. Tujuan Kunjungan Wisata
3. Objek Wisata
4. Jenis-jenis Pariwisata
5. Faktor-faktor Pendukung Dunia Pariwisata
6. Manfaat pengembangan Desa Wisata



3. Pemilihan kelompok kerja masyarakat (TKM);

Kelompok kerja masyarakat merupakan media tempat berkumpul masyarakat, terutama tokoh-tokoh masyarakat. Maksud dan tujuan pembentukan Tim pelaksana kegiatan masyarakat (TKM) adalah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan Desa Wisata, mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi. TKM perlu dilibatkan dalam perencanaan pengembangan Desa Wisata agar mereka ikut merasa memiliki program kegiatan tersebut sehingga mereka diharapkan lebih bertanggung jawab dalam memelihara dan mengembangkan program tersebut.

Metode yang digunakan dalam pembentukan TKM adalah melalui Community Meeting dan workshop. Teknik-teknik yang digunakan dalam kegiatan pembentukan Tim kerja Masyarakat dalam perencanaan pengembangan desa wisata Gedepangrango, antara lain :

1. Fokus group Discussion (FGD)
2. Diagram Venn

Kegiatan pembentukan Tim Kerja Masyarakat ini dilaksanakan di kantor Desa Gedepangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi.

Peserta pada kegiatan ini adalah para tokoh masyarakat yang ada di Desa Gedepangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi.

Fasilitator pada kegiatan ini adalah peneliti sendiri

Hasil dari kegiatan pembentukan tim kerja masyarakat adalah tersedianya kelompok-kelompok kerja masyarakat yang dapat dijadikan mitra pemerintah daerah dalam pengembangan Desa Wisata.



4. Penyusunan Rencana kerja;

Kegiatan yang paling utama dari Perencanaan pengembangan Desa Wisata adalah penyusunan rencana kerja. Maksud dan tujuan disusun rencana kerja adalah agar kegiatan pengembangan Desa Wisata dapat dilakukan lebih terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pengembangan Desa Wisata adalah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja adalah melalui Community Meeting dan workshop. Teknik-teknik yang digunakan dalam kegiatan pembentukan Tim kerja Masyarakat dalam perencanaan pengembangan desa wisata Gedepangrango, antara lain

1. Fokus group Discussion (FGD)
2. Diagram Venn

Kegiatan pembentukan Tim Kerja Masyarakat ini dilaksanakan di kantor Desa Gedepangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi.

Peserta pada kegiatan ini adalah para tokoh masyarakat yang ada di Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Aparat Desa, Camat dan Dinas Pariwisata.. Fasilitator pada kegiatan ini adalah peneliti sendiri

Hasil dari kegiatan penyusunan rencana kerja masyarakat adalah tersusunnya Desain pengembangan Desa Wisata.



5. Penyusunan Peraturan Desa

Peraturan yang telah disusun yaitu terkait dengan pengaturan transportasi (angkot, ojeg, dll) dan juga keterlibatan untuk tenaga kerja di sekitar lokasi wisata adalah untuk orang lokal saja. Peraturan ini sedang dalam pengerjaan dan menunggu untuk disahkan menjadi perdes (Peraturan Desa).

Peraturan yang diharapkan ke depannya dapat dibuat adalah terkait dengan hal berikut :

1. Perekonomian
 - a. Standarisasi harga pedagang supaya pengunjung tidak kapok
 - b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait peluang ekonomi yang ada

- c. Untuk para pedagang , menjual dengan harga murah karena banyak yang kapok
 - d. Belum adanya pusat oleh-oleh hasil kerajinan masyarakat/ hasil karya masyarakat
 - e. Saya dari RW 09 Khawatir tentang pedagang alpukat harga sampai Rp. 30.000 takut kapok
 - f. Adanya minuman keras
2. Mengenai pengelolaan sampah
- a. Pengelolaan sampah
 - b. Penanganan sampah
 - c. Limbah Wisata
 - d. Pengelolaan air bersih di desa
 - e. Diadakan PDAM desa
3. Media Teknologi dan pembaharuan
- a. Membuat WEB khusus oleh desa yang menampilkan informasi wisata yang lengkap
 - b. Pengalihan fungsi lapanga bola cicurug menjadi yang lain
 - c. Untuk pembentukan paguyuban pedagang wisata situ gunung
4. Area Wisata
- a. Tempat parkir, perusahaan
 - b. Mohon untuk tiket masuk supaya bisa menjadi satu pintu
 - c. Belum adanya kendaraan khusus wisata (misalnya wara wiri) yang menjadi khas wisata

Dapat di simpulkan bahwa peraturan yang di butuhkan masyarakat desa Gede Pangrango mengenai perekonomian perdagangan di wisata situgunung , dan peraturan kedua yang di butuhkan mengenai pengelolaan sampah di wisata situgunung.

KESIMPULAN

Setiap komunitas pasti memiliki aset komunitas, meskipun untuk masing-masing lokasi jenis, kualitas dan kuantitasnya berbeda-beda. Aset komunitas tersebut apabila dikelola dengan baik dapat dioptimalkan untuk mengembangkan Desa Wisata. Desa Wisata adalah Desa yang berupaya mengoptimalkan potensi dan sumber yang ada untuk pengembangan pariwisata yang ditujukan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Untuk mengembangkan Desa Wisata, perlu perencanaan yang matang. Perencanaan Pengembangan desa wisata meliputi Pemetaan Aset Komunitas, Pemetaan Stakeholder Pemangku Kepentingan, Sosialisasi dan Penyadaran tentang Desa Wisata dan Sapta Pesona Wisata, Pembentukan Tim Kerja Masyarakat, Penyusunan Rencana Kerja, serta Penyusunan Peraturan-peraturan Desa untuk mengatur tata kelola Desa Wisata. Langkah-langkah tersebut adalah langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh peneliti bersama masyarakat dan aparat secara partisipatif, karena desa wisata adalah konsep pengembangan wisata yang berbasis masyarakat. Artinya Konsep Pengembangan Wisata dengan mengoptimalkan Aset Komunitas yang merupakan kekuatan- kekuatan yang ada di masyarakat dan dikembangkan dengan cara kolaborasi antara masyarakat, aparat pemerintah dan pihak-pihak yang relevan untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian untuk menyempurnakan desain perencanaan pengembangan desa wisata yang dibuat, maka perlu dilengkapi selain kegiatan penyusunan rencana kerja, juga penyusunan anggaran biaya. Selain itu, Peraturan-peraturan desa yang dibuat juga harus dilengkapi dengan standar operasional prosedur (SOP) yang terperinci dan jelas. Dengan demikian, Desa Wisata yang dikembangkan betul-betul direncanakan secara

matang secara partisipatif baik keuntungan maupun kerugiannya, sehingga dapat mengurangi dampak-dampak yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alghaasyiyah, Nauri. 2014. *Kontribusi Wanita Pemulung dalam Mendukung Perekonomian Keluarga (Skripsi)*. Bengkulu: Universitas Bengkulu
- Chambers, Robert. 1983. *Rural Development Putting the Last First*. Longman Inc.
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama
- Indriantoro dan Supomo. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Irwanto. 2006. *Focused Group Discussion (FGD) : Sebuah Pengantar Praktis*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Madya, Suwarsih. 2011. *Teori dan Praktik Penelitian Tindakan*. Bandung : CV Alfabeta.
- Noerdin, dkk. 2006. *Potret Kemiskinan Perempuan*. Jakarta : Women Research Institute.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Reason, Bradbury. 2006. *Handbook of Action Research*. New York : Sage Publication.
- Robbins, Stephen P. 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*. Alih Bahasa Jusuf Udaya, Jakarta, Arcan
- Rustanto, Bambang. 2015. *Menangani Kemiskinan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sadli, Saporinah & Soemarti Patmonodewo. 1997. *"Identitas Gender dan Peranan Gender" dalam Kajian Wanita Dalam Pembangunan, penyunting Ihromi*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi, Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Suryawati, Chriswardani. 2005. *"Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional"*, Jurnal Manajemen Pembangunan dan Kebijakan, Volume 08, No. 03, Edisi September (121-129).
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : Refika Aditama
- Theresia, dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat : Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2014. *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*, cetakan ke-23. Jakarta : Rajawali Pers.
- Wulansari, Puji. 2011. *Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Nelayan (Studi Kasus Di Desa Sendang Sikucing Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal*. Yogyakarta.
- Sumber lain :
- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat. 2018. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Maret 2018 di <https://jabar.bps.go.id/publication/2018/07/31/dbbdcdbbf6c9b731fafb5b7f/perkembangan-tingkat-kemiskinan-provinsi-jawa-barat-maret-2018.html> (Akses 3 Januari 2019)
- Sapa Indoneisa. 2012. *Pendampingan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsep Dan Strategi* di <http://www.sapa.or.id/f2/346-pendampingan-sosial-dalam-pemberdayaan-masyarakat-miskin-konsep-dan-strategi> (akses 3 Januari 2019)

Kemensos RI. 2013. *Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu* di http://dokhuk.kemsos.go.id/sisdok/index.php?p=show_detail&id=2017 (Akses 3 Januari 2019)

